

Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Prasejahtera (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe)

Amru Alba¹, Rudi Kurniawan², Taufik Gunawan³, Muhaddis⁴

¹⁻⁴*Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional*

Email : 1.albaabqa@gmail.com, 2.r.kurniawan@gmail.com, 3.taufikgunawan67@gmail.com,
4.almuhammadis5@gmail.com

Abstrak.

Pre-prosperous families do not understand that social assistance must be accounted for according to technical instructions. Recipients of social assistance do not know that the assistance they receive must be used according to the budget plan and the activity implementer must submit a report to the Directorate of Social Security, Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia and BPKP to check whether the assistance is appropriate and on target. The aim of implementing this service is to provide understanding to underprivileged families that social assistance is provided selectively and recipients are researched professionally. Social assistance is provided to improve the standard of living of underprivileged families, paying attention to justice, propriety, rationality and benefiting from the principles of transparency, accountability, fairness and selectiveness. Social Assistance is assistance in the form of money or goods given to protect underprivileged families from social risks. The method used is socialization through seminars, problems are answered by collecting data, documentation and interviews. Partners in implementing this socialization are the village head, Village Representative Council, village figures and students. Researchers obtained data from underprivileged families regarding aid that was right on target, aid was not distributed all at once but was divided into stages and the use of the budget was checked by the Financial and Development Audit Agency.

Keywords: Policy; Social Assistance; Pre-Prosperous Families.

Abstract.

Keluarga pra sejahtera tidak memahami bahwa bantuan sosial harus dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis. Penerima bantuan sosial tidak tahu bahwa bantuan yang diterimanya harus digunakan sesuai rencana anggaran dan pelaksana kegiatan harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan BPKP memeriksa apakah bantuan sudah tepat guna dan tepat sasaran. Tujuan pelaksanaan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman kepada keluarga pra sejahtera bahwa bantuan sosial diberikan secara selektif dan penerima diteliti secara profesional. Bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga pra sejahtera, memperhatikan keadilan, kepatutan, rasionalitas dan mamfaat atas prinsip transparansi, akuntabilitas, adil dan selektif. Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang atau barang yang diberikan untuk melindungi keluarga pra sejahtera dari resiko sosial. Metode yang digunakan, sosialisasi melalui seminar, permasalahan dijawab dengan mengumpulkan data, dokumentasi dan wawancara. Mitra dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah kepala desa, Dewan Perwakilan Desa, tokoh-tokoh desa dan mahasiswa. Peneliti mendapatkan data-data dari keluarga pra sejahtera tentang bantuan yang tepat sasaran, bantuan tidak disalurkan sekaligus tetapi dibagi dalam tahap-tahap serta penggunaan anggaran diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

Kata kunci: Kebijakan; Bantuan Sosial; Keluarga Pra Sejahtera.

LATAR BELAKANG

Masih banyak keluarga pra sejahtera belum tersentuh bantuan karena keluarga pra sejahtera rata-rata berpendidikan rendah, tinggal di daerah terpencil, terkendala dengan transportasi dan biaya, tidak bisa memenuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan data

tidak akurat. Data itu penting, tetapi karena proses pendataannya yang membutuhkan waktu yang lama, maka data sering tidak akurat tetapi kalau data sudah masuk ke badan pusat statistik data ini dianggap baku.

Bantuan sosial membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga pra sejahtera, mengurangi pengangguran, menanggulangi penyakit sosial serta merealisasikan kepentingan dan ekonomi. Bantuan sosial memiliki kepentingan yang perlu diakomodir, walau dalam merealisasikan bantuan sosial timbul permasalahan-permasalahan yang mendapat perhatian publik. Bantuan sosial pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pra sejahtera, meningkatkan pendapatannya, mengurangi pengangguran dan mengurangi jumlah keluarga pra sejahtera itu sendiri.

Di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, bantuan sosial lebih banyak digunakan untuk memperbaiki sarana fisik dibandingkan untuk meningkatkan kapasitas keluarga pra sejahtera, pelatihan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga pra sejahtera. Bantuan digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah, kantor geuchik, meunasah, memperbaiki mesjid, membangun jalan dan lorong-lorong baru.

Permasalahan-permasalahan yang dijumpai di Meunasah Asan Kecamatan Blang Mangat diantaranya, masih banyak keluarga pra sejahtera yang belum menerima bantuan sosial, masih ada keluarga pra sejahtera yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada keluarga pra sejahtera yang tidak memiliki e-KTP, e-Kartu Keluarga dan salah data antara Disdukcapil/ Kemendagri sama buku tabungan, baik nama, tempat lahir, alamat, nama ibu dan lain-lain, bahkan dalam satu tahun anggaran menerima 2 bantuan, misalnya antara bantuan pangan non tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Permasalahan lain, tidak tepat manfaat, tidak tepat guna dan tidak tepat mutu.

Sebagian orang menyamakan kebijaksanaan dengan policy karena mereka belum mengetahui terjemahan yang tepat tentang “policy”. Kebijakan yang menyangkut masalah. Kebijakan yang menyangkut masalah yang dihadapi lalu mengambil keputusan tentang isi. Cara yang ditentukan dan waktu pengambilan keputusan dilaksanakan tidak tepat. Hakekatnya kebijakan mencakup mengapa, kapan, apa, siapa, bagaimana, dimana dan uang. Setiap kebijakan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak (Tangkilisan, Hesel Nogi, 2013).

Permasalahan sosial erat kaitannya dengan politik dan ekonomi. kehidupan sosial masyarakat saat ini mengalami penurunan moral dan nilai-nilai luhur. Peranan keluarga inti sebagai kendaraan utama dalam menanamkan nilai-nilai sosial saat ini mulai pudar. Peran keluarga sudah digantikan oleh internet dan lingkungan yang negatif. Jika ini tidak kita perbaiki, kedepan maka kehidupan sosial akan menjadi lebih buruk. Tidak akan ada perubahan masyarakat jika tidak ada perubahan pada individu-individu dalam masyarakat itu sendiri.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam waktu 16 tahun (sejak 2007 (bantuan PKH misalnya), menurut warga Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan warga Gampong Meunasah Asan kepada pemerintah. Warga Gampong Meunasah Asan, idealnya lebih memilih untuk mencari biaya hidup sendiri dibandingkan dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat Gampong Meunasah Asan menganggap pemberian bantuan sosial tidak menentu dan tidak pasti. Menurut warga Gampong Meunasah Asan, bantuan sosial tidak berpengaruh pada tingkat sejahtera atau tidak penduduknya.

Definisi sosial harus mencakup lebih dari seorang individu dan terikat pada kesatuan interaksi (Dani Endarto, 2014). Bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai-Minyak Goreng (BLT-MG), Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut keluarga pra sejahtera di Meunasah Asan, kurang memadai, kurang mencukupi dan kurang merata.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dengan objek penelitian kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga pra sejahtera. Alasan pemilihan lokasi di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat karena 8 (delapan) mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nasional sedang melakukan kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) selama 2 bulan di Gampong Meunasah Asan. Selain itu, Gampong Meunasah Asan termasuk gampong dengan kategori sedang, bukan perkotaan dan juga bukan gampong terpencil, sehingga bisa menggambarkan keadaan Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe secara keseluruhan. Warga Gampong Meunasah Asan pada umumnya tidak memiliki lahan untuk bertani dan berkebun, mereka bukan petani tetapi pada umumnya buruh, ini yang membuat kehidupan ekonomi keluarga pra

sejahtera tidak pernah berubah. Di bidang perikanan, warga Gampong Meunasah Asan bukan nelayan, gampong mereka tidak ada laut. Data lain membuktikan, lahan untuk peternakan tidak ada, keluarga pra sejahtera hanya memelihara 3 sampai 5 pasang ternak, selain itu, rumah-rumah keluarga pra sejahtera belum memenuhi syarat dalam hal sanitasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, teori dijadikan sebagai pemandu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Anggito, A., & Setiawan, J, 2018).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci, peneliti menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi merupakan kajian utama penelitian. Peneliti datang ke lokasi, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali, dari sumber yang berhubungan erat dengan peristiwa yang diteliti. Hasil yang diperoleh disusun, apa yang diamati tidak terlepas dari konteks lingkungan.

Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses, bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Untuk mengungkapkan proses, bukan hasil. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya memerlukan pemaparan mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja (Barlian, E, 2018). Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Metode pengumpulan data menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa pedoman wawancara, kamera, photo dan lainnya. Metode pengumpulan data ini termasuk kategori laporan diri atau deskripsi diri. Individu melaporkan tentang keadaan dirinya berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Peneliti ini menghitung hal-hal yang lebih mendalam, meskipun apa yang kami temui tidak diungkapkan dengan angka-angka, bagaimana mereka melakukan analisis pada data tersebut sangat berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti kuantitatif (Anwar & Syarifudin, 2013).

Metode pengumpulan data, terdiri dari data penelitian yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, dan data fisik. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan sumber data (Sugianto, dkk., 2020). Wawancara pada penelitian ini sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin mewawancarai sumber data semua warga sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Peneliti juga melakukan pengamatan dengan melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau dan perasa. Pencatatan dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Pengambilan data melalui lisan langsung dengan sumber datanya, melalui tatap muka. Jawaban informan direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti, pengambilan data melalui dokumen tertulis. Observasi dalam penelitian ini tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga digunakan untuk merekam berbagai situasi dan kondisi (Sugiono, 2015).

Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dampak dari kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga pra sejahtera dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Bahan statistik juga dimanfaatkan sebagai dokumen selain photo, yang mampu memberikan informasi, data membantu peneliti dalam menganalisa. Dengan dokumen-dokumen ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (Tangkilisan dan Hesel Nogi, 2013).

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, perlu dirumuskan indikator-indikator sosial sebagai acuan, standar bagi rencana tindak lanjut dan hasil-hasil yang akan dicapai serta membangun dukungan dan legitimasi. Pada tahap ini perlu menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Setelah itu, melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat agar tercapai kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan (Wirawan, 2015).

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal pemerintah, lembaga atau organisasi. Jika hukum dapat memaksakan suatu perilaku maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam kehidupan, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan. Kebijakan itu kita temukan dalam banyak bidang, misalnya: bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Kebijakan diharapkan dapat menyelesaikan masalah setelah kebijakan itu diterapkan, mencegah, memperkecil masalah dan menjadi solusi (Solichin Abdul wahab, 2014).

Salah satu keluarga disebut pra sejahtera karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga pra sejahtera dapat disebabkan oleh kelangkaan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara *subyektif* dan *komparatif*, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (Amru Alba dan Rudi Kurniawan 2019).

Pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas, dari pusat ke daerah (kota) tidak dimaksudkan untuk merubah perilaku aparat pemerintah kota terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemberian bantuan sosial memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga pra sejahtera untuk memperoleh bantuan sosial. Kebijakan bantuan sosial merupakan kemauan politik pemerintah dan menempatkan bantuan sosial sebagai fokus sistem sosial. Alasan-alasan yang melatar belakangi bantuan sosial antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat pra sejahtera agar memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki posisi tawar yang tinggi dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga mereka (Eva Yuliantari, 2018).

Bantuan Sosial lebih mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sedangkan pemberdayaan sosial lebih mendorong penerima untuk berusaha meningkatkan kemampuannya, melalui stimulan usaha produksi. Keberhasilan kebijakan pemberian Bansos ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan dan dipengaruhi oleh arah kebijakan sosial yang bersifat makro (Purwanto Indra, 2020).

Cara yang dilakukan pelaksana dalam melakukan keluasaannya sebagian besar tergantung pada kecenderungan pelaksana terhadap suatu kebijakan dan bagaimana melihat

pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan pemerintah kota dalam bidang bantuan sosial. Meskipun sumber-sumber untuk implementasi suatu kebijakan cukup dan para pelaksana tahu apa dan bagaimana melaksanakannya, serta mereka memiliki komitmen untuk melakukannya, implementasi bisa saja tidak efektif karena struktur birokrasi tidak efisien. Oleh karena itu, dalam mengimplementasi kebijakan, harus memperhatikan struktur pemerintah kota, dimana birokrasi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program (Firdausu, Alfu Zukhrufu, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Dengan adanya kebijakan akan merubah pola pikir masyarakat dari menyerahkan segala sesuatu pada nasib menjadi lebih aktif melakukan perubahan. Kebijakan biasanya menjadi rujukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan hendaknya dipahami sebagai kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijakan mencakup apa, bagaimana, mengapa, siapa dan dimana. Kebijakan itu mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso dan mikro. Kebijakan adalah hasil keputusan organisasi. Contoh: undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, keputusan walikota, keputusan direktur, dan lain-lain.

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal pemerintah, lembaga atau organisasi. jika hukum dapat memaksa suatu perilaku maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari apa yang disebut kebijakan. Kebijakan itu kita temukan dalam banyak bidang, misalnya: bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kebijakan diharapkan dapat menyelesaikan masalah setelah kebijakan itu diterapkan, mencegah, memperkecil masalah dan menjadi solusi.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kebijakan digunakan secara luas, namun kebijakan juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus. Berbeda dengan hukum dan peraturan, meskipun kebijakan juga mengatur apa

yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kebijakan diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberikan peluang diinterpretasikan sesuai kondisi lapangan. Kebijakan sebagai arah kegiatan, dan bukan sekedar keputusan.

Istilah kebijakan atau orang sering mengistilahkan dengan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan *policy*. Banyak kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk mengubah status sosial orang miskin, mengubah keadaan orang miskin, termasuk memberikan pendidikan gratis kepada orang miskin, kerja sosial untuk membersihkan tempat tinggal orang miskin, mencari pekerjaan untuk orang miskin, selain memberikan bantuan tunai berupa uang dan barang secara langsung (Bethesda Sitanggang, AB Tangdililing dan Sri Maryuni, 2014).

Kebijakan yang kita bicarakan disini adakah kebijakan tentang bantuan sosial. Yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat.

1. Bantuan Sosial

Definisi sosial harus mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi. Karena lebih dari seorang individu maka terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya (Tapung, M. M, 2020). Ada empat jenis Bansos. *Pertama*, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis lembaga (panti, KUBE). *Kedua*, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup. *Ketiga*, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam. *Keempat*, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban pengusuran (Amru Alba dan Rudi Kurniawan 2019).

Bantuan sosial dikucurkan melalui anggaran negara, bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan layak untuk menerimanya, diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bantuan sosial dapat bersifat sementara (bencana alam) dan dapat bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang dan barang atau melalui transferan. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Kebijakan sosial menentukan jenis dan sistem pemberian bantuan sosial kepada keluarga pra sejahtera sebagai sasaran program. Pengetahuan tentang analisis kebijakan sosial penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai keinginan penerima bantuan, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan itu mampu mengatasi masalah-masalah yang dirasakan oleh keluarga pra sejahtera (Amru Alba & Rudi Kurniawan, 2023).

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial, semakin maju suatu negara semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial. Negara harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan sosial karena negara adalah institusi sah yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat. Oleh karena itu negara paling berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sosial dasar bagi keluarga pra sejahtera. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan seorangpun warga negaranya berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial, semakin maju suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial. Negara perlu berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan sosial karena negara adalah institusi sah yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Data sangat penting, bantuan sosial hanya bisa disalurkan dengan akurat jika datanya akurat. Kalau datanya salah, maka bantuan sosial yang seharusnya diterima keluarga pra sejahtera, dinikmati oleh orang yang berada, sedangkan keluarga pra sejahtera ketinggalan. Apalagi bantuan sosial dari pemerintah pusat, jika data salah maka keluarga itu tidak dapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kalau tidak punya kartu KKS maka tidak dianggap keluarga pra sejahtera. Resikonya anak-anak dari keluarga pra sejahtera ini tidak dapat Kartu Indonesia Pinter (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Akibatnya keluarga miskin yang seharusnya dipelihara oleh negara menjadi terabaikan dari sentuhan bantuan pemerintah, sekolah dan berobat harus membayar. Ini semua akibat dari pendataan yang salah.

Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada keluarga pra sejahtera di Gampong Asan Kareung Kecamatan Blang Mangat maupun kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

- a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako
- b. Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Bantuan Langsung Tunai BBM
- d. Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng
- e. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- f. Kelompok Usaha Bersama
- g. Bantuan Beasiswa Miskin
- h. Bantuan untuk Anak Yatim
- i. Biaya Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan
- j. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- k. Bantuan untuk Panti Asuhan
- l. Bantuan untuk Disabilitas.

2. Keluarga Pra Sejahtera

Pra sejahtera disebabkan oleh banyak faktor, jarang ditemukan keluarga pra sejahtera yang hanya disebabkan oleh satu faktor. Misalnya cacat, pendidikannya rendah, tidak punya modal usaha, tidak punya ketrampilan, tidak adanya kesempatan kerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial dan hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infastruktur yang terbatas.

Keluarga pra sejahtera tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori perkapita (BPS), tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 1,00 dolar AS per hari (Bank Dunia), tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya, tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah dan berpergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan (BKKBN dalam Amru Alba & Rudi Kurniawan, 2019).

Keluarga disebut pra sejahtera ketika seseorang tidak sanggup memelihara kebutuhan diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja, pra sejahtera identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Namun, pengertian pra sejahtera akan berbeda dalam masyarakat kota, pra sejahtera berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga pra sejahtera menjadi masalah sosial.

Kemiskinan bisa dikatakan sebagai masalah yang tiada henti mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, bahkan sampai pada orde reformasi sekarang ini. Kesenambungan masalah kemiskinan dari masa ke masa ditandai oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah satu ke pemerintah yang lain, dari presiden satu ke presiden yang lain (Amru Alba & Rudi Kurniawan, 2019).

Garis kemiskinan (*proverty line*) dapat diukur berdasarkan pendapatan ekuivalen beras, yaitu suatu penduduk berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya dibawah 240 kg per kapita pertahun bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau 360 kg per kapita per tahun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Garis kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan bahan bakar.

3.Hambatan Pemberian Bantuan Sosial

Penghambat kebijakan pemberian bantuan sosial di Kota Lhokseumawe adalah bayaknya aktor yang terlibat, loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada proyek, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu janjang, waktu dan pergantian pemimpin. Tentang banyaknya aktor, dapat penulis jelaskan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, yang memengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan, komunikasi makin rumit, maka akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam banyak kasus, terdapat loyalitas ganda, dimana para pihak yang terlibat, seharusnya dia berperan untuk keberhasilan dalam menyetujui suatu kegiatan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami penundaan karena adanya komitmen tertentu terhadap suatu kegiatan.

Kerumitan pada proyek dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan barang, perilaku pelaksana dan perilaku masyarakat tempat proyek dilaksanakan. Tentang pengambilan keputusan, makin banyak tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada saat proyek dilaksanakan, penyaluran dana yang diperlukan membutuhkan banyak waktu karena membutuhkan persetujuan banyak pihak. Tentang seringnya pergantian kepala dinas misalnya, makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana sampai pelaksanaan, makin besar

kemungkinan pelaksana menghadapi hambatan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan (Amru Alba & Rudi Kurniawan, 2019).

Bantuan sosial yang disalurkan Pemkot Lhokseumwe diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga pra sejahtera. Karena ini Bansos, otomatis hibah, tanpa harus dikembalikan. Efek negatifnya, rata-rata masyarakat Kecamatan Blang Mangat tidak menggunakan bantuan ini sebagaimana mestinya. Para pelaksana program jarang memiliki kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggungjawab program dengan sumber-sumber yang ada (Amru Alba & Rudi Kurniawan, 2019).

Hal terpenting yang harus dibahas ketika kita membicarakan pelaksanaan kebijakan publik adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) walau sebenarnya juga terdapat hal lain yang perlu diperhatikan. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan punya pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya Standar Operasional Prosedur. Prosedur-prosedur itu dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik maupun swasta.

Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu lembaga, semakin besar pula probalitas standar operasional prosedur menghambat implementasi. Birokrasi-birokrasi dimana standar operasional prosedur tidak sangat melekat karena badan baru atau tingkat pergantian personil yang tinggi mungkin lebih tanggap terhadap kebutuhan bagi cara-cara yang lazim untuk implementasi. Sementara itu, waktu yang lama dan perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya.

4. Proses dan Dampak Bantuan Sosial

Kata sosial berkonotasi dengan aktifitas-aktifitas masyarakat atau organisasi yang bersifat volunter, swakarsa, swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, Perseroan Terbatas (PT) atau bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selama tahap siklus kebijakan, masalah, usulan, dan tuntutan yang diungkapkan diubah menjadi program pemerintah. Perumusan dan adopsi kebijakan meliputi penetapan tujuan, apa yang harus dicapai dengan kebijakan, dan pertimbangan alternatif tindakan yang berbeda. Proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial dapat dikelompokkan ke dalam identifikasi, implementasi dan evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait.

Paling tidak terdapat 2 (dua) persoalan mendasar dalam implementasinya, yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa bantuan sosial merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerinah daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka pemerataan bantuan bagi keluarga pra sejahtera (Amru Alba & Rudi Kurniawan, 2019).

Sumber daya juga merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan sosial yang efektif. Sumber daya bisa meliputi: sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan sumberdaya yang ada seperti dana, sarana dan pra sarana. Ketersediaan sumber daya mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial. Tanpa sumber daya, kebijakan tentang pemberian bantuan sosial sulit untuk diterapkan. Dalam memberikan bantuan sosial diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Kecukupan dan *skill* petugas pengelola sangat diperlukan dalam mengadministrasikan dana yang diterima terutama pengelolaan dana bantuan sosial harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi (Amru Alba & Muhammad Nazaruddin, 2017).

Keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial juga dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik pelaksana dalam menghadapi berbagai persoalan. Sikap memegang peranan penting dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan karena jika para pelaksana memperhatikan suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi pelaksana dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat kebijakan.

Menangani masalah bantuan sosial mengalami banyak kendala karena pelaksana harus menghadapi keluarga pra sejahtera. Warga pra sejahtera umumnya berpendidikan rendah, banyak yang tidak menamatkan sekolah dasar, tidak memiliki mata pencaharian, tidak memiliki modal, tinggal ditempat yang tidak layak, kurang informasi, tidak punya tanah untuk bercocok taman dan jauh dari perkotaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian uang atau barang kepada keluarga pra sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bantuan sosial tidak diberikan secara terus-menerus, bantuan diberikan selektif dan penggunaan anggaran digunakan secara jelas. Bantuan sosial diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan mengurangi angka keluarga pra sejahtera.

Permasalahan-permasalahan dalam pemberian bantuan sosial dapat diatasi jika sistem pengendalian internal ditingkat propinsi bagus dan independen. Pengambil kebijakan yang menyangkut ranah politik seharusnya tidak mengintervensi administrasi pemerintahan, sehingga aturan yang sudah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif bisa dijalankan. Solusi yang harus dilakukan adalah bantuan sosial hanya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan dari suatu golongan atau partai tertentu.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial hendaknya dirubah seperti bantuan keuangan kepada pemerintah kota yaitu dana dari kas provinsi ditransfer dulu ke rekening pemerintah kota. Mekanisme ini akan membuat dana diterima masyarakat tepat jumlah dan utuh. Solusi ini memang masih memerlukan pemikiran yang lebih panjang dari para pengambil kebijakan tetapi jika gubernur tidak membenahi masalah ini, maka persoalan ini akan membawa konsekuensi kearah korupsi.

Proses perumusan kebijakan bantuan sosial antara lain: *pertama*, bantuan sosial ada dua, bantuan yang berbentuk uang dan barang. Bantuan sosial diberikan kepada keluarga pra sejahtera dan hibah diberikan kepada orang yang beresiko sosial. *Kedua*, bantuan sosial dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kota, ada nama dan alamat penerima, tidak gelondongan. *Ketiga*, bantuan sosial ada 2 (dua), bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak direncanakan. *Keempat*, bantuan sosial dikhususkan untuk keluarga pra sejahtera sedangkan hibah untuk masyarakat umum yang beresiko sosial.

Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik dan bencana supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kembali kebutuhan hidup minimum. Selain itu, lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan yang melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial juga bisa menerima bantuan. Selain daripada itu, dalam pemberian bantuan sosial juga ada kriterianya, misalnya bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat saja berkelanjutan menerima bantuan.

Kriteria penerima bantuan sosial adalah mereka-mereka yang memiliki identitas dan berdomisili dalam wilayah pemerintah daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang didalamnya terdapat unsur-unsur kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika disana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Kehidupan sosial erat kaitannya dengan bentuk kehidupan berjalan. Kehidupan sosial dibagi dua, kehidupan sosial di pedesaan dan kehidupan sosial di perkotaan.

Masyarakat berdasarkan tempat tinggalnya dibagi dua, masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Keadaan masyarakat perdesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan itu hidupnya homogen, masih berlandaskan pada konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Perilakunya masih berorientasi pada tradisi dan status, adanya isolasi sosial sehingga masyarakatnya statis. Tidak lepas kendali, ada norma-norma sosial yang selalu dijaga dan masih menjaga kesatuan dan keutuhan budaya. Sedangkan masyarakat perkotaan, perilakunya sudah heterogen, mengandalkan diri, dan lembaganya. Perilakunya berorientasi pada rasionalitas dan fungsi serta mobilitas sosial tinggi, sehingga dinamik dan kelihatan individualistis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Geuchik Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang telah menyetujui dan memberikan kesempatan kepada tim penulis untuk melaksanakan pengabdian kepada tokoh-tokoh dan masyarakat Gampong Meunasah Asan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada 10 (sepuluh) mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional yang telah membantu penulis melaksanakan kegiatan pengabdian selama 2 (dua) bulan di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua STIA Nasional yang telah menyediakan dana guna terlaksananya kegiatan pengabdian dosen di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

DAFTAR RUJUKAN

- Amru Alba dan Rudi Kurniawan (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, Unimal Pers, Lhokseumawe
- Amru Alba dan Muhammad Nazaruddin (2017). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin. Unimal Pers. Lhokseumawe.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anwar, Syarifudin (2013). Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Barlian, E. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Bethesda Sitanggang, AB Tangdililing dan Sri Maryuni (2014), Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya, Program Magister Ilmu Sosial (PMIS), Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSIAN), Universitas Tanjungpura (UNTAN), Tesis.
- Dani Endarto (2014), Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa (UNITAS), Padang, Tesis.
- Dani Endarto (2019). Pelaksanaan Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Jurnal Hukum, Vol.2 Nomor 1.
- Eva Yuliantari (2018). Efektivitas Dan Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima KUBE Di Kabupaten Badung. *E Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 17(4), 773-805
- Firdausu, Alfu Zukhrufu (2020). Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.1 Nomor 3.
- Laloan Inrico Reyvaldo, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Jurnal JAP No. 101 Vol.VII.
- Posumah Hanny Johnny, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Jurnal JAP Vol.VII No. 101
- Purwanto Indra. (2020). Analisis Ketempatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Sugiyanto (2017). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- Sugiono (2015). Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta Sumber tentang Metode-Metode Baru, terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Sugianto, dkk. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19, Jakarta Timur.

- Tapung, M. M., Regus, M., Payong, M. R., Rahmat, S. T., & Jelahu, F. M. (2020). Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis Covid-19 di Manggarai. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 12–26.
- Tangkilisan, Hesel Nogi (2013). *Kebijakan Publik yang Membumi*, YPAPI, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul (2014). *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Bumi Aksara*, Jakarta.
- Wibawa, Samudra (2014), *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Wirawan (2015). Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Kerambitan. *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. 6 (1)